

AGRIBISNIS KAKAO DAN PRODUK OLAHANNYA BERKAITAN DENGAN KEBIJAKATAN TARIF PAJAK DI INDONESIA

Maswadi¹

ABSTRACT

One of the policies that impact perceived economic actors in Indonesia, especially in the plantation agriculture sector is the policy of fiscal policy determination of the Value Added Tax of 10% of local transactions, especially cocoa beans and cocoa export tax exemption to foreign countries, processed cocoa export tax by 30% and processed cocoa import tax of 5%. Assessment is made considering one of the driving factors is the dominant market of cocoa beans is the overseas market. It can spur international trade, especially cocoa products which will increase foreign exchange, can also be a source of employment especially in the country and also increase the income of the people (farmers and businessmen) who are involved in agribusiness cocoa. However, the impact of this policy will be re-perceived economic actors involved in agribusiness cocoa if cacao products from Indonesia to compete in international markets.

Key words: *Cacao, Indonesian, Tax rate policy*

PENDAHULUAN

Pengembangan agribisnis merupakan pendekatan dalam pembangunan pertanian yang tidak hanya memandang pertanian sebagai produksi primer di usahatani saja, melainkan mencakup juga produksi dan distribusi alat, bahan input dan jasa pertanian, serta distribusi dan pengolahan hasil pertanian. Kondisi ini menyebabkan kegiatan agribisnis telah melibatkan beberapa sektor dalam perekonomian termasuk sektor pertanian sebagai basis dari agribisnis. Melakukan pengembangan agribisnis atau tepatnya upaya rekonstruksi agribisnis tidak dapat dilakukan secara parsial mengingat agribisnis adalah suatu rangkaian sistem usaha berbasis pertanian dan sumberdaya lain, dari hulu sampai hilir.

Agribisnis mencakup sub-sistem sarana produksi atau bahan baku di hulu, proses produksi di tingkat usahatani, aktivitas transformasi berbagai fungsi bentuk (pengolahan), waktu (penyimpanan atau pengawetan), dan tempat (pergudangan) serta pemasaran dan perdagangan di hilir dan subsistem pendukung lain seperti jasa, permodalan, perbankan dan sebagainya. Memilah-milah suatu sistem agribisnis dalam satuan yang terpisah hanya akan menimbulkan gangguan serius dalam seluruh rangkaian yang

ada, dan bahkan dapat menciptakan permasalahan tingkat berikutnya yang lebih dasyat.

Kegiatan agribisnis di Indonesia dalam sektor pertanian mencakup agribisnis tanaman pangan dan hortikultura, agribisnis tanaman obat-obatan, agribisnis tanaman perkebunan, kehutanan, agribisnis perikanan dan agribisnis peternakan. Khusus produk perkebunan kegiatan usaha agribisnis terus berlangsung pada setiap subsistem agribisnis, mengingat beberapa produk perkebunan merupakan produk andalan ekspor Indonesia selain produk-produk perikanan. Beberapa komoditas utama perkebunan yang menjadi andalan ekspor Indonesia adalah karet, kelapa, kelapa sawit, kakao, kopi dan teh.

Kakao merupakan salah satu komoditas andalan perkebunan yang peranannya cukup penting bagi perekonomian nasional, khususnya bagi penyedia lapangan kerja, sumber pendapatan dan devisa negara. Disamping itu kakao juga berperan dalam mendorong pengembangan wilayah dan pengembangan agroindustri. Pada tahun 2002, perkebunan kakao telah menyediakan lapangan kerja dan sumber pendapatan bagi sekitar 900 ribu kepala keluarga petani yang sebagian besar berada di Kawasan Timur Indonesia serta memberikan sumbangan devisa terbesar ke tiga sub sektor perkebunan

¹ Dosen Fakultas Pertanian, Universitas Tanjungpura, Pontianak

setelah karet dan minyak sawit dengan nilai sebesar US \$ 701 juta.

Dalam sistem agribisnis kakao kiranya perlu dilihat peran intersektoral dalam sistem agribisnis tersebut (khususnya pertanian yakni usaha perkebunan kakao, perdagangan, industri dan lembaga keuangan yang berkaitan dengan usaha perkebunan kakao) untuk mendapatkan gambaran mengenai peran agribisnis perkebunan pada skala usaha daerah maupun nasional. Dengan demikian, pendekatan agribisnis terjadi reorientasi dari penanganan sektoral menjadi intersektoral, dan dari orientasi produksi menjadi orientasi bisnis.

Pengertian agribisnis mengandung dua dimensi penting, *pertama*, agribisnis mengandung pengertian fungsional, yaitu sebagai rangkaian fungsi-fungsi kegiatan perusahaan pertanian. *Kedua*, sistem agribisnis mengandung pengertian struktural, yaitu sebagai kumpulan unit usaha atau unit kegiatan dan lembaga lain yang melaksanakan fungsi-fungsi dari masing-masing subsistem. Demikian sistem agribisnis kakao baik dari hulu sampai hilir mengandung pengertian fungsional sebagai rangkaian fungsi-fungsi kegiatan perusahaan perkebunan kakao (usaha perkebunan rakyat, perkebunan swasta dan perkebunan besar negara) dan mengandung pengertian struktural yaitu sebagai kumpulan unit usaha yang melaksanakan fungsi-fungsi dari masing-masing subsistem (usaha pengadaan input produksi kakao, usaha perkebunan kakao, usaha pengolahan hasil atau agroindustri kakao, usaha perdagangan atau pemasaran kakao, usaha jasa dan pendukung agribisnis kakao).

KONDISI AGRIBISNIS KAKAO INDONESIA

Masing-masing subsistem dalam agribisnis kakao memiliki keluaran atau output yang berbeda-beda dan harga produk tiap subsistem berbeda tergantung jenis produk, mutunya, nilai tambah dari produk tersebut, besarnya investasi agribisnis kakao serta jarak produk kakao dari produsen sampai pada konsumen akhir atau singkatnya tataniaga produk tersebut. Perbedaan setiap subsistem

agribisnis kakao menggambarkan pendapatan yang berbeda pada setiap unit usaha pada subsistem tersebut.

Ditinjau dari segi produktivitas, Indonesia masih berada di bawah produktivitas rata-rata negara lain penghasil kakao. Tahun 2008 luas areal perkebunan kakao 1.563.423 ha dan produksi 795.581 ton namun produktivitas dan mutunya masih sangat rendah. Produktivitas rata-rata tanaman kakao di Indonesia hanya 660 kg/ha sedangkan Pantai Gading mencapai 1,5 ton/ha. Kondisi ini menyebabkan citra kakao Indonesia dinilai kurang baik di pasaran internasional. Produksi biji kakao dunia selengkapnya disajikan pada Tabel 1.

Luas areal pengembangan kakao di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, diikuti dengan produksinya dalam kurun waktu 8 tahun terakhir. Namun bila dilihat kemampuan areal lahan kakao, peningkatan tertinggi pada tahun 2003 selanjutnya mengalami penurunan sampai pada tahun 2008 atau terjadi penurunan sekitar 40% dari produktivitas tertinggi yang pernah dicapai yaitu 1,1 ton per hektar. Penyebab utama rendahnya produktivitas dan mutu adalah karena menipisnya unsur hara tanah, serangan hama Penggerek Buah Kakao (PBK) dan penyakit *Vascular Streak Dieback* (VSD), menurunnya kualitas kebun juga masih belum optimalnya pengembangan produk hilir kakao.

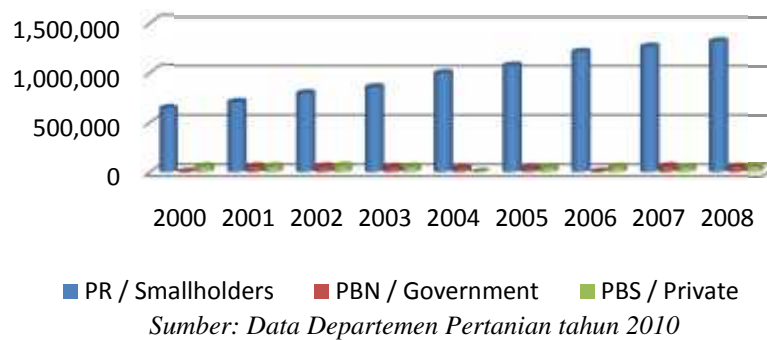
Usaha perkebunan kakao

Sistem agribisnis kakao tidak dapat dipisahkan dari subsistem utama yaitu budidaya kakao atau usaha perkebunan kakao yang pelakunya adalah petani. Petani kakao dapat menjalankan fungsinya baik sebagai petani yang mengelola usaha perkebunannya dan juga sebagai pengusaha yang melakukan fungsi agroindustri yaitu mengolah hasil kebun kakao menjadi produk biji kakao yang siap untuk dipasarkan, juga petani dapat menjalankan fungsi pemasaran yaitu memasarkan produk berupa buah atau biji kakao ke konsumen. Berdasarkan status kepemilikan, usaha perkebunan kakao di Indonesia terbagi atas Usaha Perkebunan Rakyat (PR), Usaha Perkebunan Besar Negara (PBN) dan Perkebunan Besar Swasta (PBS)

Tabel 1. Data luas areal, produksi dan produktivitas komoditi kakao Indonesia

Tahun	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)
2000	749.917	421.142	891,78
2001	821.449	536.804	956,39
2002	914.051	571.155	924,07
2003	961.107	698.816	1.101,12
2004	1.090.960	691.704	898,00
2005	1.167.046	748.828	921,00
2006	1.320.820	769.386	849,00
2007	1.379.279	740.006	801,00
2008	1.425.216	803.594	660,00

Sumber: Data Departemen Pertanian tahun 2010

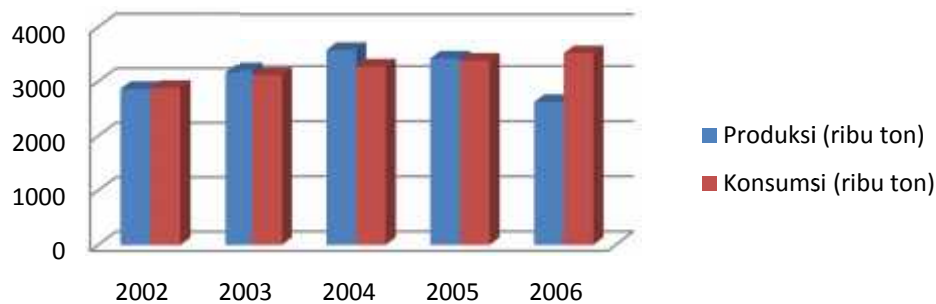


Gambar 1. Luas areal kakao Indonesia berdasarkan status pengusaha

Tabel 2. Produksi dan konsumsi biji kakao dunia tahun 2002 – 2006.

Negara-Negara	Produksi (Ribu Ton)					Konsumsi (Ribu Ton)				
	2002	2003	2004	2005	2006	2002	2003	2004	2005	2006
Afrika	1952	2231	2550	2379	2577	421	447	446	493	507
Amerika	377	428	462	443	447	767	814	852	853	856
Asia & Oceania	538	510	525	560	568	416	499	575	622	651
Eropa						1262	1320	1346	1375	1462
Total	2867	3169	3537	3382	3592	2885	3079	3238	3343	3476

Sumber: Data Departemen Pertanian tahun 2010



Gambar 2. Produksi dan konsumsi biji kakao dunia

Berdasarkan status pengusahaannya, perkebunan kakao di Indonesia didominasi oleh usaha Perkebunan Rakyat yang mencapai 87,4%, Perkebunan Besar Negara 6,0% dan Perkebunan Besar Swasta 6,67%. Tentunya kebijakan pengembangan usaha perkebunan kakao oleh pemerintah akan mengarah pada petani kebun kakao juga segala akibat persaingan produksi dan pasar produk kakao domestik maupun mancanegara secara jelas yang terkena dampak adalah petani kakao. Mulai tahun 2009 sampai 2011, Departemen Pertanian telah melaksanakan Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional melalui program rehabilitasi, peremajaan dan intensifikasi perkebunan rakyat. Provinsi yang menjadi sasaran utama perbaikan produksi dan mutu kakao tersebut yakni Sulawesi Selatan (10 kabupaten), Sulawesi Barat (5 kabupaten), Sulawesi Tenggara (5 kabupaten) dan Sulawesi Tengah (8 kabupaten), Nusa Tenggara Timur (2 Kabupaten), Bali (2 kabupaten), Maluku (2 kabupaten) Papua Barat (2 kabupaten) dan Papua (4 kabupaten).

Tahun 2002 sampai 2006 Indonesia tetap menjadi produsen kakao terbesar ketiga setelah Pantai Gading dan Ghana. Keberhasilan menjadi produsen kakao ketiga di dunia berkat program perluasan dan peningkatan produksi yang mulai dilaksanakan sejak awal tahun 1980-an. Kendati produsen kakao terbesar di dunia, faktanya industri kakao sulit tumbuh dan berkembang di Indonesia. Saat ini Indonesia harus bersaing dengan negara-negara produsen kakao lainnya dalam meraih peluang pasar. Hal ini perlu perhatian yang lebih intensif mengingat mutu kakao kalah bersaing dengan mutu kakao dari negara tersebut. Perhatian terhadap agribisnis hulu, pengusaha perkebunan kakao, industri pengolahan merupakan indikator suksesnya persaingan produk kakao di tingkat internasional. Peluang untuk meningkatkan usaha perkebunan kakao dapat diketahui dari potensi pasar kakao tingkat dunia karena pasar dominan produk kakao adalah mancanegara.

Pasar kakao

Negara-negara penghasil kakao dominan adalah negara-negara Afrika, Asia dan Oceania juga negara-negara Amerika. Negara-

negara di Eropa tidak memproduksi kakao namun sebagai konsumen dari produk kakao.

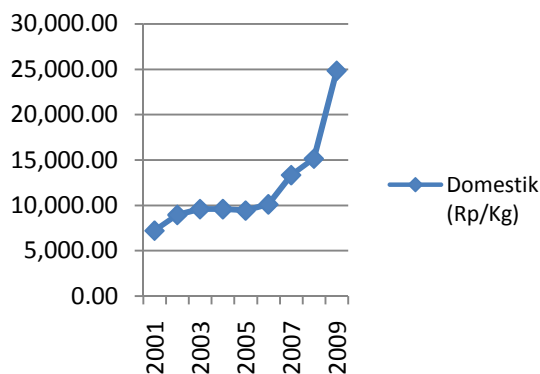
Negara-negara konsumen kakao terbesar masih dipegang negara-negara Eropa sebanyak 42,10 persen, sedangkan produsen kakao terbesar masih dipegang negara-negara Afrika, Asia dan Oceania. Permintaan tertinggi berasal dari Negara Belanda, Amerika Serikat dan Jerman. Konsumsi kakao cenderung meningkat tiap tahun di negara-negara maju. Perkembangan produksi dan konsumsi kakao dunia dapat digambarkan pada Gambar 2.

Dalam hal pemasaran dan penguasaan pangsa pasar internasional, komoditas perkebunan dan pertanian umumnya menderita gejala struktur pasar yang sangat asimetris antara pasar internasional dan pasar domestik. Gejala asimetris tersebut sering dianalogikan dengan fenomena serupa pada hubungan antara petani produsen dan pedagang atau konsumen, karena produsen komoditas perkebunan sebagian besar berada di negara-negara berkembang sementara konsumen produk hilir perkebunan berada di negara-negara maju. Bagi negara-negara berkembang yang lebih banyak mengandalkan ekspor komoditas pertanian dan agroindustri, struktur pasar yang asimetris jelas merupakan ancaman serius bagi peningkatan produksi, produktivitas dan ekspor komoditas.

Pasar ekspor produk kakao Indonesia yang kebutuhannya lebih dari 20.000 ton beberapa tahun terakhir adalah China, Malaysia, Singapura, Amerika Serikat, Australia dan Brasil. Data Askindo tahun 2008, total ekspor kakao mencapai 142.000 ton dan 40% di antaranya dipasarkan ke Amerika Serikat, sedang sisanya 60% persen dipasarkan ke pasar Asia dibanding Eropa. Sekitar 70 persen dari total produksi biji kakao nasional diekspor dalam bentuk biji kakao mentah, hanya 30 persen yang diolah di dalam negeri jadi produk kakao olahan seperti *cocoa butter*, *cocoa liquor*, *cocoa cake* dan *cocoa powder* untuk kebutuhan dalam negeri dan diekspor. Kakao yang diimpor Uni Eropa dari negara berkembang kemudian diolah menjadi berbagai komoditi berbeda. Produk hasil olahan kakao tersebut kemudian diekspor kembali ke berbagai negara asal bahan mentahnya termasuk Indonesia. Umumnya produk olahan kakao yang diekspor kembali oleh Uni Eropa adalah coklat dan produk

makanan yang mengandung coklat. Namun demikian disamping produk olahan kakao, diantara negara Uni Eropa juga terjadi perdagangan ekspor biji kakao untuk keperluan industri pengolahan yang membutuhkan kakao sebagai bahan bakunya.

Hal terpenting yang menentukan tingkat harga di pasar internasional adalah mutu biji kakao. Oleh karenanya perhatian produsen kakao Indonesia terhadap kualitas biji kakao yang diekspor sangat penting. Namun harga biji kakao di tingkat internasional sering mendapat potongan sampai 15 persen karena persyaratan standar mutu biji dan persyaratan fermentasi kakao yang relatif rendah bila dibandingkan dengan harga produk yang sama dari negara produsen lain. Rendahnya nilai mutu biji kakao disebabkan karena hama dan umur tanaman yang sudah tua juga mutu kakao mengandung keasaman yang tinggi, rendahnya senyawa prekursor flavor, dan rendahnya kadar lemak. Perkembangan harga kakao dunia dan Indonesia yang bersumber dari Departemen Pertanian dan ICCO. Org. sebagai berikut:

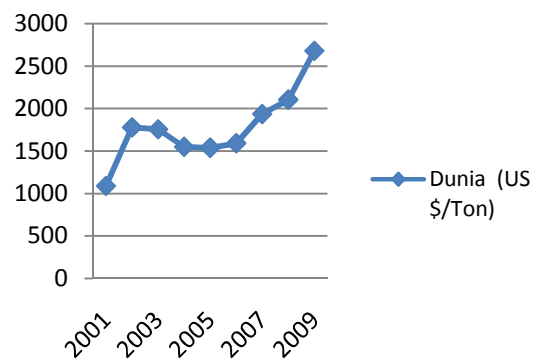


Tabel 3. Perkembangan Harga Kakao Indonesia dan Dunia.

Tahun	Domestik (Rp/Kg)	Dunia (US \$/Ton)
2001	7.208,00	1088,7
2002	8.948,00	1778,0
2003	9.576,00	1754,9
2004	9.579,00	1548,4
2005	9.421,00	1538,1
2006	10.103,00	1590,7
2007	13.325,00	1934,6
2008	15.136,00	2102,8
2009	24.819,00	2677,00

Sumber: Data Departemen Pertanian tahun 2010

Perkembangan harga yang meningkat setiap tahun merupakan peluang bagi produsen kakao seperti Indonesia maupun negara lain untuk semakin giat mengembangkan usaha bidang agribisnis kakao. Meningkatnya harga seiring dengan meningkatnya kebutuhan konsumsi dunia terhadap produk-produk berbahan dasar kakao yakni coklat. Pada Gambar 3 menunjukkan kenaikan harga kakao sejak tahun 2001 hingga tahun 2009.



Sumber: Data Departemen Pertanian Tahun 2010

Gambar 3. trend harga kakao tingkat domestik dan tingkat dunia tahun 2001-2009

Naiknya harga tingkat domestik maupun dunia tidak memberi dampak yang berarti kepada pelaku agribisnis kakao. Berdasarkan data Dirjen Perkebunan Departemen Pertanian Rendahnya mutu kakao Indonesia tidak saja menimbulkan kerugian besar di pasaran dunia terutama Amerika Serikat, tapi juga berdampak terhadap pendapatan petani dan produsen kakao. Potensi kerugian penjualan biji kakao Indonesia ke Amerika Serikat akibat

mutu rendah sekitar US\$301,5/ton. Jika ekspor biji kakao Indonesia ke AS rata-rata 130 ribu ton/tahun, maka terdapat potensi kehilangan devisa sebesar US\$39.195 juta per tahun atau setara dengan Rp360,6 miliar/tahun. Sedangkan kerugian akibat rendahnya tingkat produktivitas sekitar Rp3,96 triliun/tahun.

Kondisi pasar kakao tingkat domestik berdasarkan data Asosiasi Kakao Indonesia (Askindo) untuk tahun 2008 dari total

produksi biji kakao nasional 70 % diekspor dalam bentuk biji kakao mentah, hanya 30 % yang diolah di dalam negeri menjadi produk kakao olahan seperti *cocoa butter*, *cocoa liquor*, *cocoa cake* dan *cocoa powder* untuk kebutuhan dalam negeri dan juga diekspor. Berdasarkan data tahun 2008 produksi biji kakao nasional 803.594 ton, berarti 562.515,8 ton biji kakao mentah diekspor dan sisanya 241.078,2 ton biji kakao mentah diolah di dalam negeri. Informasi selanjutnya pada tahun 2009 dari produksi yang diserap di pasar domestik 140.000 ton, selebihnya dipasarkan ke luar negeri. Padahal kapasitas terpasang industri dalam negeri mencapai 230.000 ton, tapi utilitasnya hanya sekitar 140.000 ton. Sisanya diekspor karena biji kakao tidak dapat dijual ke pasar tradisional.

Agroindustri kakao

Produk kakao selama ini lebih banyak diekspor dalam wujud biji kering kakao dibandingkan hasil olahannya, sehingga nilai tambahnya terhadap perekonomian sedikit. Diduga yang menjadi faktor pendorong adalah selain harga yang semakin tinggi, juga pembebasan tarif ekspor sehingga tanpa pengolahan lanjut setelah fermentasi dan pengemasan biji kakao sudah dapat diekspor. Namun ini merupakan faktor penyebab eksportir tidak memperhatikan kualitas biji kakao yang ditentukan di pasar dunia. Selanjutnya kualitas biji kakao yang diekspor oleh Indonesia dikenal sangat rendah (berada di kelas 3 dan 4). Hal ini disebabkan oleh, pengelolaan produk kakao yang masih tradisional (85% biji kakao produksi nasional tidak difermentasi) sehingga kualitas kakao Indonesia menjadi rendah. Kualitas rendah menyebabkan harga biji dan produk kakao Indonesia di pasar internasional dikenai diskon USD200/ton atau 10%-15% dari harga pasar. Selain itu, beban pajak ekspor kakao olahan (sebesar 30%) relatif lebih tinggi dibandingkan dengan beban pajak impor produk kakao (5%), kondisi tersebut telah menyebabkan jumlah pabrik olahan kakao Indonesia terus menyusut (Suryani, 2007). Selain itu para pedagang (terutama trader asing) lebih senang mengekspor dalam bentuk biji kakao (non olahan).

Sementara mengenai pengolahan biji kakao di Indonesia, dari 16 industri

pengolahan kakao dengan kapasitas mencapai 230.000 ton, hanya terdapat lima pabrik di antaranya yang masih tetap memproduksi sesuai dengan kapasitas terpasang. Total kapasitas terpasang kelima industri tersebut mencapai 140.000 ton.

Subsistem pendukung dan penunjang

Berkaitan dengan infrastruktur, sebagian besar sentra-sentra produksi kakao nasional terdapat di daerah-daerah yang jaraknya cukup terpencil dari kota besar tempat penampungan ataupun pelabuhan. Padahal jalan dan khususnya jembatan sebagai infrastruktur yang menghubungkan sentra-sentra produksi kakao belum terbangun dengan baik.

Disamping itu, jumlah dan kualitas sarana gudang dan pelabuhan kurang memenuhi syarat untuk menjangkau sentra-sentra produksi kakao. Kondisi ini menjadi kendala bagi pengembangan agribisnis kakao khususnya pada sentra produksi yang belum memiliki pelabuhan ekspor. Kendala lain yang dihadapi dalam pengembangan agribisnis kakao adalah masih lambatnya penyebarluasan teknologi maju hasil penelitian. Kondisi ini terutama disebabkan oleh terbatasnya tenaga penyuluh dan pembina petani serta terbatasnya dana penyebarluasan teknologi maju.

Terdapat beberapa kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengembangan kakao di Indonesia, yakni (1) PPN 10 % terhadap transaksi lokal atas biji kakao; (2) pembebasan tarif ekspor ke luar negeri; (3) pajak ekspor kakao olahan (sebesar 30%) relatif lebih tinggi dibandingkan dengan beban pajak impor produk kakao (5%); (4) Kebijakan Pengendalian hama PBK secara nasional; (5) diskon harga (automatic detention) yang dikenakan terhadap ekspor biji kakao Indonesia oleh Amerika Serikat; dan (6) Mulai tahun 2009 Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional melalui program rehabilitasi, peremajaan dan intensifikasi perkebunan rakyat.

Dengan mengetahui kapasitas terpasang industri dalam negeri juga harga kakao yang semakin meningkat serta kebutuhan dunia yang meningkat dan kebijakan pemerintah, maka investasi usaha dan agribisnis kakao masih menjadi peluang bagi pelaku ekonomi di Indonesia untuk dikembangkan.

DAMPAK KEBIJAKAN FISKAL TERHADAP AGRIBISNIS KAKAO INDONESIA

Kebijakan fiskal yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia telah berdampak pada agribisnis kakao Indonesia. Kebijakan tersebut berdampak positif juga negatif.

Usaha Perkebunan Kakao, menciptakan peluang bagi peningkatan produksi untuk ekspor karena prospek pasar produk kakao masih menjanjikan. Ini dapat dilakukan baik bagi Usaha Perkebunan Rakyat, Perkebunan Besar Negara dan Perkebunan Besar Swasta. Berarti mendorong peningkatan pendapatan petani rakyat.

Usaha Pengadaan Input, secara tidak langsung dapat meningkatkan tambahan pendapatan karena upaya peningkatan produksi akan seiring dengan kebutuhan input yang berkualitas dan memadai yaitu, bibit, pupuk, obat-obatan dan penerapan teknologi.

Agroindustri kakao, perkembangannya terhambat, terbukti dari jumlah industri pengolahan yang semakin menurun, juga kapasitas terpasang yang semakin berkurang. Ini disebabkan karena produsen kakao lebih memilih memasarkan biji kakao ke luar negeri dengan tanpa tarif dibandingkan dalam negeri yang terkena tarif. Selain itu butuh modal yang besar bila pengusaha hendak berinvestasi dalam usaha ini. Namun peluang investasi masih dibutuhkan karena konsumsi kakao dunia masih terus meningkat.

Jasa penunjang dan pendukung, pelaku usaha yang terlibat dalam agribisnis kakao akan tetap mendapat keuntungan apabila kegiatan agribisnis kakao masih tetap konsisten dan berjalan di setiap subsistem yang mana pelaku usaha masih tetap melaksanakan fungsinya masing-masing, yakni fungsi penyimpanan, pengangkutan, perbankan, penelitian dan pengembangan agribisnis kakao, promosi, informasi pasar dan infrastruktur serta kebijakan terkait pengembangan kakao.

SIMPULAN

Kesimpulan yang dapat dibuat berdasarkan pada pembahasan kebijakan fiskal yang terkait dengan pengembangan agribisnis kakao adalah:

1. Setiap pelaku yang terlibat dalam subsistem agribisnis kakao masih dapat meningkatkan pendapatan karena pasar kakao masih terbuka produk kakao yang hendak dipasarkan, hanya saja bagi petani dan pengusaha agroindustri perlu dengan teliti mengetahui dan memperhatikan standart mutu kakao yang ada di pasaran.
2. Kebijakan fiskal oleh pemerintah telah memacu peningkatan produksi dalam negeri, namun produktivitas hasil semakin menurun karena petani perkebunan kakao sudah tidak memperhatikan kualitas kebun, berusaha menekan hama dan penyakit serta kualitas buah yang dipanen

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2007. Gambaran Sekilas industri Kakao. Deperindang. Diakses pada tanggal 03 Februari 2010 dari: <http://www.deperindag/kakao.indonesia.pdf>.
- Arifin Bustanul. 2005. Pembangunan Pertanian, Paradigma Kebijakan dan Strategi Revitalisasi. Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.
- Departemen Pertanian. 2010. Statistik Perkebunan Indonesia. Jakarta
- Mardikanto T. 2009. Membangun Pertanian Modern. Penerbit Lembaga Pengembangan Pendidikan UNS dan UNS Press. Surakarta
- Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan. 2005. Menumbuhkan Ide dan Pemikiran "Pembangunan Sistem dan Usaha Agribisnis". Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan. Bogor.
- Reynaldi, R. 2010. Produksi Kakao, Askindo Menargetkan Produksi Biji Kakao Mencapai 540.000 Ton. Diakses pada tanggal 27 Februari 2010 dari: <http://www.kontan.co.id/index.php/bisnis/news/28775/Askindo.Menargetkan-Produksi-Biji-Kakao-mencapai-540.000-Ton>.
- Rohman S. 2009. Teknik Fermentasi Dalam Pengolahan Biji Kakao. Diakses pada

- tanggal 27 Februari 2010 dari:
<http://www.majarimagazine.com/2009/06/teknik>
- Tampubolon S. 2002. Simtem dan Usaha Agribisnis, Kacamata Sang Pemikir. Pusat Studi Pembangunan IPB. Bogor.
- Tim Bina Karya Tani. 2009. Pedoman Bertanam Cokelat. Penerbit CV. Yrama Widya. Bandung.
- Tim Tanaman Perkebunan Besar. 2005. Prospek dan Arah Pengembangan Agribisnis Kakao di Indonesia. Diakses pada tanggal 27 Februari 2010 dari:
http://www.ipard.com/art_perkebun/Prospek_dan_Arah_Pengembangan_Agribisnis_Kakao_Final.pdf.
- Widodo S. 2008. Campur Sari Agro Ekonomi. Penerbit Liberty. Yogyakarta.
- Zulfebriyansah dan Suryani,D. 2007. Komoditas Kakao: Potret dan Peluang pembiayaan. Diakses pada tanggal 27 Februari 2010 dari:
<http://www.bni.co.id/portals/0/Document/komoditas-kakao.pdf>.